

**PERDAGANGAN – PENETAPAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2007
2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERDAGANGAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, peluang usaha dan memberikan perlindungan terhadap pengusaha di sektor perdagangan, dan guna mewujudkan peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan izin usaha perdagangan tersebut perlu ada penetapan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2000.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Izin Usaha Perdagangan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 3. Perubahan Perusahaan
 4. Kewenangan, Tata Cara Dan Persyaratan Penerbitan SIUP
 5. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi
 6. Golongan Retribusi
 7. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 8. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
 9. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
 10. Saat Retribusi Terutang
 11. Tata Cara Pemungutan
 12. Wilayah Pemungutan
 13. Tata Cara Pembayaran
 14. Keringanan Dan Pengurangan Retribusi
 15. Penyidikan
 16. Ketentuan Pidana
 17. Ketentuan Peralihan

18. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 28 Desember 2007

CATATAN : -